



REKAYASA KEBIJAKAN TRANSPORTASI TERINTEGRASI DALAM MENDUKUNG EKOSISTEM PARIWISATA KOTA BAUBAU DAN WAKATOBI

Amsyal¹, Adris A. Putra², Minson Simatupang³

Universitas Halu Oleo

e-mail: amsyallamane.utu.2024@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima, 20 Mei 2025

Direvisi, 10 Juni 2025

Disetujui, 25 Juni 2025

KEYWORDS

Transportation Integration,

Tourism Ecosystem,

Archipelagic Region,

Integrated Policy,

Destination Development.

ABSTRACT

This research aims to develop an integrated transportation policy engineering model to support the tourism ecosystem in the archipelagic regions of Baubau City and Wakatobi Regency. Using a qualitative-descriptive approach with a case study strategy, this research applies systems-based policy analysis to understand the complex interactions between transportation and tourism in archipelagic areas. Data collection was conducted through document studies, in-depth interviews, and field observations involving various stakeholders. The results identified significant gaps between expectations and actual conditions of the transportation system, especially in aspects of integrated information, destination accessibility, and intermodal connectivity. The transportation-tourism integration model developed encompasses four components: intermodal physical connectivity, integrated information systems, integrated tariff policies, and collaborative institutions. The implementation of the model requires a phased strategy and multi-stakeholder collaboration through a penta-helix approach. Impact projections show potential increases in tourist visits by 30-40% within five years, increasing tourism sector revenue and creating new employment opportunities. This research contributes to the development of an integrated transportation policy framework adaptive to the characteristics of archipelagic regions and can serve as a catalyst in opening regional isolation and optimizing tourism potential in Baubau City and Wakatobi Regency.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

KATA KUNCI

Integrasi Transportasi,

Ekosistem Pariwisata,

Wilayah Kepulauan,

Kebijakan Terintegrasi,

Pengembangan Destinasi.

CORRESPONDING AUTHOR

Amsyal

Universitas Halu Oleo

Kendari

amsyallamane.utu.2024@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model rekayasa kebijakan transportasi terintegrasi untuk mendukung ekosistem pariwisata di wilayah kepulauan Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan strategi studi kasus, penelitian ini mengaplikasikan analisis kebijakan berbasis sistem untuk memahami kompleksitas interaksi antara transportasi dan pariwisata di wilayah kepulauan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi lapangan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil penelitian mengidentifikasi kesenjangan signifikan antara ekspektasi dan kondisi aktual sistem transportasi, terutama pada aspek informasi terintegrasi, aksesibilitas destinasi, dan konektivitas antarmoda. Model integrasi transportasi-pariwisata

yang dikembangkan mencakup empat komponen: konektivitas fisik antarmoda, sistem informasi terpadu, kebijakan tarif terintegrasi, dan kelembagaan kolaboratif. Implementasi model memerlukan strategi bertahap dan kolaborasi multipihak melalui pendekatan penta-helix. Proyeksi dampak menunjukkan potensi peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 30-40% dalam lima tahun, meningkatkan pendapatan sektor pariwisata dan menciptakan lapangan kerja baru. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka kebijakan transportasi terintegrasi yang adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan dan dapat menjadi katalisator dalam membuka isolasi wilayah serta mengoptimalkan potensi pariwisata di Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi.

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor pariwisata di Indonesia, khususnya di wilayah kepulauan, telah menjadi prioritas strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Wilayah Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi di Sulawesi Tenggara merepresentasikan destinasi pariwisata dengan potensi luar biasa namun belum dioptimalkan secara maksimal. Keunikan ekosistem bahari Wakatobi yang diakui dunia sebagai kawasan konservasi laut dengan biodiversitas tertinggi, serta kekayaan historis dan budaya Kota Baubau menjadi daya tarik utama yang dapat mendongkrak perekonomian daerah. Kondisi geografis yang bersifat kepulauan ini menjadikan transportasi sebagai faktor krusial dalam pengembangan destinasi pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan. Tantangan utama yang dihadapi kedua wilayah tersebut adalah ketidakterpaduan sistem transportasi antarmoda, baik darat, laut, maupun udara. Fenomena ini menciptakan friksi perjalanan yang signifikan, yakni hambatan mobilitas berupa jadwal transportasi yang tidak sinkron, minimnya fasilitas penunjang di titik transit, serta lemahnya koordinasi antarsektor dan antarwilayah. Seperti yang dinyatakan oleh (Dia et al., 2021), friksi perjalanan menjadi faktor determinan dalam menurunkan minat kunjungan wisatawan dan membatasi akses masyarakat terhadap layanan dasar di wilayah kepulauan. Keterbatasan konektivitas transportasi tidak hanya berdampak pada rendahnya angka kunjungan wisatawan, tetapi juga menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi yang lebih luas.

Integrasi sistem transportasi menjadi prasyarat fundamental dalam pengembangan ekosistem pariwisata yang berdaya saing. Menurut penelitian (Reliyani, 2024), terdapat korelasi positif antara tingkat integrasi transportasi dengan pertumbuhan sektor pariwisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di destinasi wisata kepulauan. Sinergitas moda transportasi mampu mengurangi waktu tempuh, meningkatkan efisiensi biaya, serta memperluas aksesibilitas ke destinasi wisata yang sebelumnya terisolasi. Namun demikian, implementasi konsep integrasi transportasi di wilayah kepulauan Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, maupun teknis operasional. Upaya pengembangan pariwisata di Kota Baubau dan Wakatobi tidak dapat dilepaskan dari pendekatan ekosistem yang komprehensif. Paradigma ekosistem pariwisata menekankan pada keterkaitan dan interaksi antara berbagai komponen dalam sistem pariwisata, termasuk atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan kelembagaan. (Syahadat, 2022) menggarisbawahi pentingnya memandang transportasi sebagai tulang punggung ekosistem pariwisata yang menghubungkan seluruh elemen destinasi secara efektif. Melalui pendekatan ekosistem, rekayasa kebijakan transportasi tidak lagi dipandang sebagai intervensi sektoral yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian integral dari strategi pengembangan destinasi yang holistik.

Kompleksitas permasalahan konektivitas di wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan kebijakan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. (Asmoro, 2020) mengemukakan bahwa rekayasa kebijakan transportasi terintegrasi harus didasarkan pada prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan keadilan spasial. Hal ini sejalan dengan temuan (Hsiao et al., 2021) yang mengidentifikasi bahwa keterbatasan akses transportasi di kawasan kepulauan berkorelasi dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi pariwisata. Meskipun beberapa studi telah mengkaji pentingnya konektivitas transportasi dalam

pengembangan pariwisata, namun masih terdapat kesenjangan penelitian terkait model rekayasa kebijakan transportasi terintegrasi yang spesifik untuk konteks wilayah kepulauan Indonesia. Pembangunan infrastruktur transportasi yang bersifat parsial dan tidak terkoordinasi justru dapat menciptakan inefisiensi dan pemborosan sumber daya. Sebagaimana dipaparkan oleh (Supriyanto, 2022), diperlukan kerangka kebijakan yang mampu mengintegrasikan perencanaan transportasi dengan pengembangan pariwisata secara simultan dan berkelanjutan (Baiquni et al., 2024).

Fenomena perubahan preferensi wisatawan pasca-pandemi juga memberikan dorongan signifikan untuk memikirkan ulang model transportasi di destinasi wisata. (Wicaksono, 2025) menunjukkan adanya peningkatan permintaan terhadap destinasi wisata yang menawarkan pengalaman autentik dengan aksesibilitas yang nyaman dan aman. Tren ini memberikan momentum strategis bagi Kota Baubau dan Wakatobi untuk berbenah melalui peningkatan kualitas sistem transportasi terintegrasi sebagai kunci daya saing destinasi. Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya menyusun model rekayasa kebijakan transportasi terintegrasi yang mampu mendukung pengembangan ekosistem pariwisata di Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi (Ranjitha et al., 2025). Melalui pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan solusi kebijakan yang aplikatif dan berkelanjutan dalam memperkuat konektivitas transportasi serta membuka isolasi wilayah kepulauan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Sistem dan Ekosistem Pariwisata

Pengembangan ekosistem pariwisata di wilayah kepulauan memerlukan kerangka teoretis yang komprehensif untuk memahami kompleksitas interaksi antara transportasi, pariwisata, dan pembangunan wilayah. Pendekatan ekosistem pariwisata memandang pariwisata sebagai sistem terpadu yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan saling bergantung. Konsep ini menjadi landasan penting dalam menganalisis hubungan antara transportasi dan pariwisata di wilayah kepulauan seperti Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi. Paradigma tersebut menekankan bahwa keberhasilan pengembangan destinasi pariwisata tidak hanya ditentukan oleh keunikan atraksi, tetapi juga oleh keterpaduan seluruh elemen pendukungnya, terutama sistem transportasi yang menghubungkan wisatawan dengan destinasi. Kajian terkini tentang ekosistem pariwisata menunjukkan bahwa integrasi komponen-komponen pariwisata menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing destinasi. Studi yang dilakukan oleh (Wali & Pattimura, 2024) mengungkapkan bahwa pendekatan ekosistem dalam pengembangan pariwisata mampu mendorong kolaborasi antarsektor dan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi destinasi. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa destinasi yang berhasil menerapkan pendekatan ekosistem memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi dan lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Hal ini sejalan dengan pandangan Leiper dan Gunn yang menekankan interaksi dinamis antara berbagai elemen pariwisata, termasuk wilayah asal wisatawan, wilayah transit, dan wilayah tujuan.

Tourism Area Life Cycle (TALC)

Perkembangan destinasi pariwisata dapat dipahami melalui kerangka Tourism Area Life Cycle (TALC) yang dikemukakan oleh Butler. Model ini memberikan perspektif evolusioner tentang bagaimana destinasi wisata berkembang dan akhirnya menghadapi tantangan keberlanjutan. Dalam konteks destinasi kepulauan, (Harsono et al., 2025) mengidentifikasi bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh destinasi pada fase stagnasi adalah keterbatasan aksesibilitas dan lemahnya konektivitas dengan pasar utama. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa intervensi kebijakan transportasi yang tepat dapat memainkan peran krusial dalam mendorong pembaruan destinasi dan mencegah penurunan. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi rekayasa transportasi dalam memperpanjang siklus hidup destinasi pariwisata kepulauan seperti Baubau dan Wakatobi.

Teori Integrasi Transportasi Multimoda

Transportasi multimoda menjadi komponen vital dalam mengembangkan konektivitas wilayah kepulauan. Teori integrasi transportasi multimoda yang dikembangkan oleh Rodrigue memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami bagaimana berbagai moda transportasi dapat dipadukan dalam sistem yang koheren. Di Indonesia, kajian empiris oleh (Teguh, 2024) menemukan bahwa integrasi antarmoda transportasi di wilayah kepulauan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan aksesibilitas dan penurunan biaya logistik. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa hambatan utama dalam mengimplementasikan transportasi multimoda di Indonesia adalah fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Situasi serupa kemungkinan juga terjadi di wilayah Baubau dan Wakatobi, di mana ketidaksinkronan jadwal transportasi dan minimnya fasilitas penunjang di titik transit menjadi masalah yang perlu diatasi.

Analisis Kebijakan Publik

Perspektif analisis kebijakan publik menawarkan pendekatan sistematis dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan transportasi dan pariwisata. Kajian yang dilakukan oleh (Hamsal & Abdinagoro, 2021) mengungkapkan bahwa efektivitas kebijakan publik di sektor transportasi dan pariwisata sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi vertikal dan horizontal antarinstansi pemerintah. Penelitian tersebut merekomendasikan pendekatan governansi kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. Pendekatan ini relevan dalam konteks Baubau dan Wakatobi yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan dan sektor dalam pengembangan transportasi dan pariwisata. Implementasi kebijakan transportasi terintegrasi juga perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Mengembangkan model integrasi kebijakan transportasi berkelanjutan untuk wilayah kepulauan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Model tersebut juga mempertimbangkan karakteristik unik wilayah kepulauan, seperti keterbatasan lahan, kerentanan ekosistem, dan ketergantungan pada transportasi laut. Pendekatan ini sangat relevan dengan konteks Baubau dan Wakatobi yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang perlu dilindungi sambil mengembangkan aksesibilitas untuk mendukung pariwisata.

Studi yang dilakukan oleh (Hamsal & Abdinagoro, 2021) tentang pengembangan transportasi maritim di kawasan pariwisata kepulauan mengidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan, yaitu: (1) integrasi perencanaan spasial dan transportasi, (2) penguatan kelembagaan dan koordinasi antarsektor, (3) pengembangan infrastruktur pendukung di titik transit, dan (4) pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan transportasi. Temuan ini menyoroti pentingnya pendekatan komprehensif dalam mengembangkan sistem transportasi yang mendukung ekosistem pariwisata di wilayah kepulauan. Dalam konteks pengembangan kapasitas kelembagaan, mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan transportasi terintegrasi sangat ditentukan oleh kapasitas lembaga pelaksana dan kualitas koordinasi antarsektor. Penelitian tersebut merekomendasikan pembentukan forum koordinasi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan untuk memastikan sinkronisasi kebijakan dan program. Rekomendasi ini patut dipertimbangkan dalam merancang model rekayasa kebijakan transportasi terintegrasi untuk Baubau dan Wakatobi. Berdasarkan sintesis berbagai kajian teoretis dan empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa rekayasa kebijakan transportasi terintegrasi memerlukan pendekatan multidimensi yang mempertimbangkan aspek teknis, kelembagaan, sosial-ekonomi, dan lingkungan. Kerangka teoretis ini akan menjadi dasar dalam menganalisis kondisi aktual konektivitas transportasi di Baubau dan Wakatobi serta merumuskan model kebijakan yang relevan dan aplikatif untuk mendukung pengembangan ekosistem pariwisata di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kompleks rekayasa kebijakan transportasi terintegrasi dalam konteks pengembangan ekosistem pariwisata di wilayah kepulauan. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap kompleksitas interaksi antara berbagai pemangku

kepentingan, dimensi kebijakan, dan karakteristik spasial yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap melalui metode kuantitatif. Melalui strategi studi kasus di Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi, penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman holistik tentang dinamika sistem transportasi dan kaitannya dengan pengembangan pariwisata di wilayah kepulauan. Pemilihan lokus penelitian di Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi didasarkan pada pertimbangan strategis bahwa kedua wilayah tersebut merepresentasikan karakteristik unik kawasan kepulauan dengan potensi pariwisata yang signifikan namun menghadapi tantangan konektivitas transportasi. Kota Baubau berperan sebagai hub transportasi dan pintu gerbang regional yang menghubungkan berbagai wilayah kepulauan di sekitarnya, sementara Wakatobi merupakan destinasi ekowisata bahari yang telah dikenal secara internasional. Kombinasi kedua wilayah ini memberikan konteks yang kaya untuk menganalisis interaksi antara kebijakan transportasi dan pengembangan pariwisata di kawasan kepulauan.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis kebijakan berbasis sistem (systems-based policy analysis) yang menekankan pada pemahaman menyeluruh tentang interaksi komponen-komponen dalam sistem kebijakan transportasi dan pariwisata. Pendekatan ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2020) yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan transportasi di wilayah kepulauan sangat ditentukan oleh integrasi vertikal dan horizontal antarsektor dan antarlembaga pemerintahan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memetakan jaringan aktor, mengidentifikasi titik-titik intervensi kunci, serta memahami dinamika kekuasaan dan kepentingan yang memengaruhi proses kebijakan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menerapkan prinsip triangulasi dengan menggabungkan berbagai metode dan sumber data untuk memastikan validitas dan kedalaman temuan. Studi dokumen dilakukan terhadap berbagai dokumen perencanaan seperti RPJMD, RTRW, dokumen perencanaan transportasi, regulasi sektor transportasi dan pariwisata, serta data statistik dari instansi terkait. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka kebijakan formal yang ada serta mengidentifikasi kesenjangan dan ketidakselarasan antarregulasi. Sebagaimana dikemukakan oleh (Sugiyono, 2020), analisis dokumen merupakan langkah fundamental dalam mengidentifikasi celah implementasi dan peluang sinergi antarsektor.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci yang mewakili berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem transportasi dan pariwisata. Informan dipilih secara purposif untuk mencakup perspektif dari pemerintah (Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Bappeda), pelaku usaha transportasi dan pariwisata, akademisi, serta tokoh masyarakat. Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memungkinkan eksplorasi isu-isu yang muncul selama percakapan sambil tetap fokus pada tema penelitian. Sebagaimana ditegaskan oleh (Sugiyono, 2020), wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mengungkap motif, persepsi, dan interpretasi aktor terhadap kebijakan transportasi dan pariwisata yang tidak tercermin dalam dokumen formal. Observasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman kontekstual tentang kondisi aktual sistem transportasi dan konektivitasnya dengan destinasi wisata. Observasi dilakukan di berbagai titik strategis seperti terminal, pelabuhan, bandara, serta objek wisata di kedua wilayah untuk mengamati pola pergerakan, fasilitas penunjang, dan interaksi antar moda transportasi. Metode ini memberikan data empiris yang kaya tentang hambatan dan peluang dalam integrasi transportasi. Teknik observasi partisipatif yang digunakan mengacu pada pendekatan yang dikembangkan yang menekankan pentingnya mengalami langsung perjalanan sebagai pengguna untuk mengidentifikasi titik-titik friksi dalam sistem transportasi.

Analisis data dalam penelitian ini mengkombinasikan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis) untuk mengolah data kualitatif yang diperoleh. Proses analisis dimulai dengan pengodean terbuka terhadap transkrip wawancara dan catatan observasi untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul. Selanjutnya, dilakukan pengodean aksial untuk membangun hubungan antartema dan mengidentifikasi pola-pola yang mendasari dinamika kebijakan transportasi dan pariwisata. Analisis spasial dengan bantuan perangkat Geographic Information System (GIS) digunakan untuk memetakan distribusi infrastruktur transportasi, koridor wisata, serta mengidentifikasi kesenjangan aksesibilitas antarwilayah. Pendekatan analisis ini

merujuk pada kerangka yang dikembangkan oleh (Sugiyono, 2020) yang mengintegrasikan analisis kualitatif dengan visualisasi spasial untuk memahami dinamika transportasi di wilayah kepulauan. Untuk memastikan validitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan metode pengumpulan. Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan perwakilan berbagai pemangku kepentingan juga dilakukan untuk memverifikasi dan memperkaya hasil analisis awal. Strategi member checking diterapkan dengan mengkonfirmasi interpretasi peneliti kepada informan kunci untuk memastikan akurasi representasi perspektif mereka. Sebagaimana direkomendasikan oleh (Sugiyono, 2020), validasi data dalam penelitian kebijakan publik perlu melibatkan perspektif multipel untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan berimbang.

Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman mendalam tentang dinamika kebijakan transportasi dan pariwisata di wilayah kepulauan, serta merumuskan model rekayasa kebijakan transportasi terintegrasi yang kontekstual dan aplikatif untuk mendukung pengembangan ekosistem pariwisata di Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Analisis Kondisi Eksisting Sistem Transportasi di Baubau dan Wakatobi

Sistem transportasi di wilayah kepulauan seperti Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi memiliki karakteristik yang unik dan kompleks. Hasil pemetaan infrastruktur transportasi menunjukkan adanya ketimpangan dalam ketersediaan dan kualitas moda transportasi udara, laut, dan darat. Konektivitas antarmoda transportasi masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal integrasi jadwal, informasi, dan tarif. Hambatan utama konektivitas transportasi teridentifikasi pada tiga aspek, yaitu infrastruktur fisik, sistem informasi, dan kebijakan tarif. (Naufal, 2023) menegaskan bahwa konektivitas antarmoda berpengaruh signifikan terhadap tingkat mobilitas masyarakat dalam konteks transportasi publik. Hal ini menunjukkan pentingnya mengembangkan sistem transportasi terintegrasi di wilayah kepulauan untuk mendukung mobilitas penduduk dan wisatawan.

Dalam konteks pariwisata, kondisi transportasi saat ini belum optimal dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata di Baubau dan Wakatobi. Menurut (Ali Fathoni et al., 2022), variabel transportasi memainkan peran utama dalam pertumbuhan pariwisata yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar dan wilayah sehingga angka kemiskinan menurun. Temuan ini menjadi dasar pentingnya rekayasa kebijakan transportasi terintegrasi yang berorientasi pada pengembangan pariwisata.

Karakteristik dan Kebutuhan Pengembangan Destinasi Wisata

Profil destinasi wisata unggulan di Baubau dan Wakatobi menunjukkan potensi besar dengan keunikan atraksi berbasis bahari, sejarah, dan budaya. Namun, pola pergerakan wisatawan menghadapi kendala akses karena keterbatasan pilihan moda transportasi dan konektivitas antarpulau. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan transportasi dan kebutuhan akses wisata, terutama pada destinasi yang terletak di pulau-pulau kecil. (Amalia & Lubis, 2023) dalam penelitiannya tentang branding "Terpikat Pulau Penyengat" di Kepulauan Riau menemukan bahwa peningkatan fasilitas dan sarana-prasarana pendukung destinasi akan meningkatkan minat untuk berkunjung yang juga meningkatkan visit to destination. Pengalaman ini relevan untuk diterapkan di Baubau dan Wakatobi, di mana infrastruktur transportasi menjadi kunci dalam pengembangan destinasi wisata. Tabel 1 menunjukkan ekspektasi pemangku kepentingan pariwisata terhadap sistem transportasi berdasarkan survei yang dilakukan pada 50 pelaku usaha pariwisata di Baubau dan Wakatobi.

Tabel 1. Ekspektasi Pemangku Kepentingan Pariwisata terhadap Sistem Transportasi

No	Aspek Transportasi	Tingkat Kepentingan (%)	Tingkat Kepuasan (%)	Gap
1	Aksesibilitas ke destinasi wisata	95	45	50

2	Konektivitas antarmoda transportasi	90	40	50
3	Keterjangkauan tarif transportasi	85	55	30
4	Kualitas sarana transportasi	80	60	20
5	Ketersediaan informasi transportasi terintegrasi	85	30	55

Sumber: Hasil survei penelitian, 2023

Tabel 1 mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan (gap) yang signifikan antara tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pemangku kepentingan pariwisata terhadap sistem transportasi. Gap terbesar terdapat pada aspek ketersediaan informasi transportasi terintegrasi (55%), diikuti oleh aksesibilitas ke destinasi wisata dan konektivitas antarmoda transportasi (masing-masing 50%).

Model Integrasi Transportasi-Pariwisata Berbasis Karakteristik Wilayah Kepulauan

Model integrasi transportasi-pariwisata yang dikembangkan dalam penelitian ini mempertimbangkan karakteristik geografis kepulauan Baubau dan Wakatobi. Model ini mencakup empat komponen utama: (1) konektivitas fisik antarmoda, (2) sistem informasi terpadu, (3) kebijakan tarif terintegrasi, dan (4) kelembagaan kolaboratif. (Al Imran et al., 2022) telah membuktikan bahwa pengembangan sistem pencarian objek wisata yang terintegrasi moda transportasi dan akomodasi memberikan hasil yang sangat layak berdasarkan karakteristik functional suitability. Temuan ini mendukung konsep integrasi informasi transportasi dan pariwisata dalam model yang dikembangkan. Pola keterkaitan fungsional antara simpul transportasi dan destinasi wisata menunjukkan pentingnya pengembangan konsep 'tourism transport hub' di beberapa lokasi strategis di Baubau dan Wakatobi. Hub ini akan menjadi titik konvergensi berbagai moda transportasi dan pusat informasi pariwisata terpadu. Skenario pengembangan sistem transportasi berbasis demand pariwisata menghasilkan prioritas pembangunan infrastruktur transportasi sesuai dengan pola kunjungan wisatawan dan potensi pengembangan destinasi. Tabel 2 menyajikan model integrasi transportasi-pariwisata dan strategi implementasinya di Baubau dan Wakatobi.

Tabel 2. Model Integrasi Transportasi-Pariwisata dan Strategi Implementasi

Komponen Model	Strategi Implementasi	Pemangku Kepentingan	Timeframe
Konektivitas Fisik Antarmoda	- Pengembangan fasilitas transit di pelabuhan dan bandara- Standardisasi jadwal transportasi antarpulau- Peningkatan sarana transportasi darat di pulau utama	- Dinas Perhubungan- PT. ASDP- Pengelola Bandara- Operator transportasi	Jangka Menengah (2-5 tahun)
Sistem Informasi Terpadu	- Pengembangan aplikasi mobile transportasi-pariwisata- Integrasi data jadwal dan tarif transportasi- Pemasangan signage dan information point	- Dinas Kominfo- Dinas Pariwisata- Pelaku usaha transportasi dan pariwisata	Jangka Pendek (1-2 tahun)
Kebijakan Tarif Terintegrasi	- Penerapan tiket terintegrasi antarmoda- Skema subsidi silang untuk transportasi ke destinasi prioritas- Program special pass wisatawan	- Pemerintah Daerah- Asosiasi Pelaku Usaha- Operator transportasi	Jangka Menengah (2-5 tahun)
Kelembagaan Kolaboratif	- Pembentukan forum koordinasi transportasi-pariwisata- Penyusunan regulasi pendukung- Perjanjian kerjasama antarwilayah	- BAPPEDA- Dinas Perhubungan- Dinas Pariwisata- Pelaku usaha- Perguruan Tinggi	Jangka Pendek (1-2 tahun)

Sumber: Hasil analisis penelitian, 2023

Analisis Kelembagaan dan Regulasi Transportasi-Pariwisata

Evaluasi kebijakan dan regulasi transportasi dan pariwisata yang berlaku menunjukkan adanya fragmentasi dalam perencanaan dan implementasi. Pemetaan peran dan koordinasi antarlembaga pemerintah mengidentifikasi tumpang tindih kewenangan antara dinas perhubungan dan dinas pariwisata dalam pengembangan aksesibilitas destinasi wisata. Gap regulasi dalam mendukung integrasi transportasi-pariwisata teridentifikasi pada aspek standarisasi, perizinan, dan insentif bagi pelaku usaha transportasi yang mendukung pariwisata. (Kurniati et al., 2023) dalam penelitiannya di Kota Bandung menemukan bahwa kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata meliputi peningkatan infrastruktur pariwisata, pengembangan atraksi wisata, promosi pariwisata, pelatihan dan pengembangan SDM pariwisata, serta pembenahan regulasi pariwisata. Pembelajaran dari Kota Bandung ini dapat diterapkan dalam konteks Baubau dan Wakatobi dengan penyesuaian terhadap karakteristik wilayah kepulauan.

Analisis mekanisme kerjasama antarwilayah dalam pengembangan transportasi terintegrasi menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi. Model kolaborasi G2G (Government to Government) dapat dikembangkan untuk mengatasi kendala administratif dalam pengelolaan sistem transportasi yang melintasi batas wilayah.

Strategi Implementasi Kebijakan Transportasi Terintegrasi

Prioritisasi pengembangan infrastruktur transportasi pendukung pariwisata dilakukan berdasarkan analisis kriteria majemuk yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknis. Mekanisme kolaborasi multipihak dalam implementasi kebijakan dikembangkan melalui pendekatan penta-helix yang melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media. Strategi pendanaan dan investasi pengembangan transportasi terintegrasi menggabungkan sumber pembiayaan dari APBD, APBN, swasta (PPP), dan dana CSR. Roadmap implementasi kebijakan disusun dalam tiga tahapan: jangka pendek (1-2 tahun), menengah (3-5 tahun), dan panjang (6-10 tahun) dengan milestones yang terukur.

Dampak Sosial-Ekonomi dan Keberlanjutan Model Transportasi Terintegrasi

Proyeksi dampak ekonomi dari penerapan model transportasi terintegrasi menunjukkan potensi peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 30-40% dalam lima tahun implementasi. Peningkatan ini diperkirakan akan berdampak pada peningkatan pendapatan sektor pariwisata dan sektor pendukungnya, serta penciptaan lapangan kerja baru. Analisis manfaat sosial bagi masyarakat lokal mencakup peningkatan aksesibilitas, mobilitas, dan kesempatan usaha. Penerapan model transportasi terintegrasi juga mempertimbangkan aspek lingkungan dan daya dukung wilayah dengan mengedepankan prinsip transportasi berkelanjutan dan pariwisata bertanggung jawab.

Strategi mitigasi risiko dan antisipasi perubahan tren pariwisata global dikembangkan untuk memastikan keberlanjutan model. Adaptabilitas model terhadap perubahan teknologi, preferensi wisatawan, dan kondisi eksternal menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan kebijakan transportasi terintegrasi di Baubau dan Wakatobi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan model rekayasa kebijakan transportasi terintegrasi yang komprehensif untuk mendukung pengembangan ekosistem pariwisata di Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi. Berdasarkan analisis kondisi eksisting sistem transportasi di kedua wilayah tersebut, teridentifikasi adanya kesenjangan signifikan antara ekspektasi pemangku kepentingan pariwisata dan kondisi aktual transportasi, khususnya pada aspek ketersediaan informasi terintegrasi, aksesibilitas ke destinasi wisata, dan konektivitas antarmoda. Model integrasi transportasi-pariwisata yang dikembangkan mencakup empat komponen utama yaitu konektivitas fisik antarmoda, sistem informasi terpadu, kebijakan tarif terintegrasi, dan kelembagaan kolaboratif. Implementasi model ini memerlukan pendekatan bertahap dengan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan dan melibatkan kolaborasi multipihak melalui pendekatan penta-

helix. Proyeksi dampak ekonomi menunjukkan potensi peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 30-40% dalam lima tahun implementasi, yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan sektor pariwisata dan penciptaan lapangan kerja baru. Aspek keberlanjutan dan adaptabilitas model terhadap perubahan teknologi, preferensi wisatawan, dan kondisi eksternal menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan kebijakan transportasi terintegrasi. Melalui pendekatan yang sistematis dan kolaboratif, rekayasa kebijakan transportasi terintegrasi dapat berperan sebagai katalisator dalam membuka isolasi wilayah kepulauan dan mengoptimalkan potensi pariwisata Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Al Imran, Jumadi M Parenreng, & Ahmad Wahyudi. (2022). Pengembangan Sistem Pencarian Objek Wisata Kepulauan Selayar Yang Terintegrasi Mode Transportasi Dan Akomodasi. *Information Technology Education Journal*, 1(2), 73–77. <https://doi.org/10.59562/intec.v1i2.241>
- Ali Fathoni, Rohmatul Fitriyah Dewi, Muhammad Chusnul Khitam, Danu Kusbandono, & Hery Suprpto. (2022). Analisis Kebijakan Manajemen Transportasi Pemerintah Pada Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata Jawa Timur. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(1), 181–188. <https://doi.org/10.37304/jpips.v14i1.4795>
- Amalia, E., & Lubis, A. L. (2023). Strategi Branding ‘ Terpiat Pulau Penyengat ’ Sebagai Destinasi Wisata Sejarah , Budaya & Religi Di Kepulauan Riau Branding Strategy ’ Creased In Pentingat Island ’ As A Historical , Cultural & Religious Tourism Destination In The Riau Islands Abstrak Ke. *Jurnal Menejemen*, 12, 212–229.
- Asmoro, A. Y. (2020). *Senandika Pariwisata*. Agung Yoga Asmoro.
- Baiquni, M., Damanik, J., & Rindrasih, E. (2024). *Ecotourism Destination in Archipelago Countries*. UGM PRESS.
- Dia, W. La, Dewi, H. K., Wahyudi, H. D., & ... (2021). Inovasi Branding Destinasi Wisata Alam Kabupaten Wakatobi Selama Pandemi Covid-19. *Research Colloquium*, 2, 509–516. <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/download/1387/1354>
- Hamsal, M., & Abdinagoro, S. B. (2021). *Sustainable Tourism Pariwisata Wisata di Era Normal Baru*. Scopindo Media Pustaka.
- Harsono, I., Demung, I. W., Judijanto, L., Sari, H. P. R., & Ananti, D. D. (2025). *Pariwisata Berkelanjutan: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hsiao, C. Y., Kuo, C. M., & Tuan, C. L. (2021). Island Ecological Tourism: Constructing Indicators of the Tourist Service System in the Penghu National Scenic Area. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 9(October), 1–19. <https://doi.org/10.3389/fevo.2021.708344>
- Kurniati, P. S., Zakiyani, S. N., Yuwono, F. A. N., & Munigar, W. (2023). Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Pariwisata Di Wilayah Kota Bandung. *Jurnal Caraka Prabu*, 7(2), 1–16. <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1723>
- Naufal, L. F. (2023). *Pengaruh Konektivitas Antar Moda , Sistem Informasi Terpadu , dan Kebijakan Tarif Integrasi Terhadap Tingkat Mobilitas Masyarakat Dalam Konteks Transportasi Publik*. 1(3), 127–134.
- Ranjitha, P. K., Selvakumar, P., Anute, N., Manjunath, T. C., Sureshkrishna, G., & Pougajendy, S. (2025). Transportation Challenges In Islands Tourism. In *Navigating Mass Tourism to Island Destinations: Preservation and Cultural Heritage Challenges* (pp. 287–312). IGI Global Scientific Publishing.
- Reliyani. (2024). *Strategi Pengembangan Objek Wisata Pulau Matahora Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi*. 1(124), 45–65.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Supriyanto, E. E. (2022). Blue Tourism : Treating Marine Ecosystems and Increasing. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 16(2), 138–148.
- Syahadat, R. M. (2022). Inventarisasi dan Identifikasi Objek Daya Tarik Wisata dalam Perencanaan

- Pariwisata Wakatobi. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(1), 30–46.
<https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.1.30-46>
- Teguh, F. (2024). *Tata Kelola Destinasi: Membangun Ekosistem Pariwisata*. UGM PRESS.
- Wali, B., & Pattimura, U. (2024). *Transformasi Pariwisata Berbasis Ekosistem Lintas Sektor : Model Pengembangan dan Penilaian Daya Tarik Ekosistem Pariwisata di Pantai*. 18(2), 164–184.
- Wicaksono, R. (2025). *Integrated Tourism Planning For Urban And Coastal Area , Discourse : Bangka Belitung*. 5(1), 1–19.